



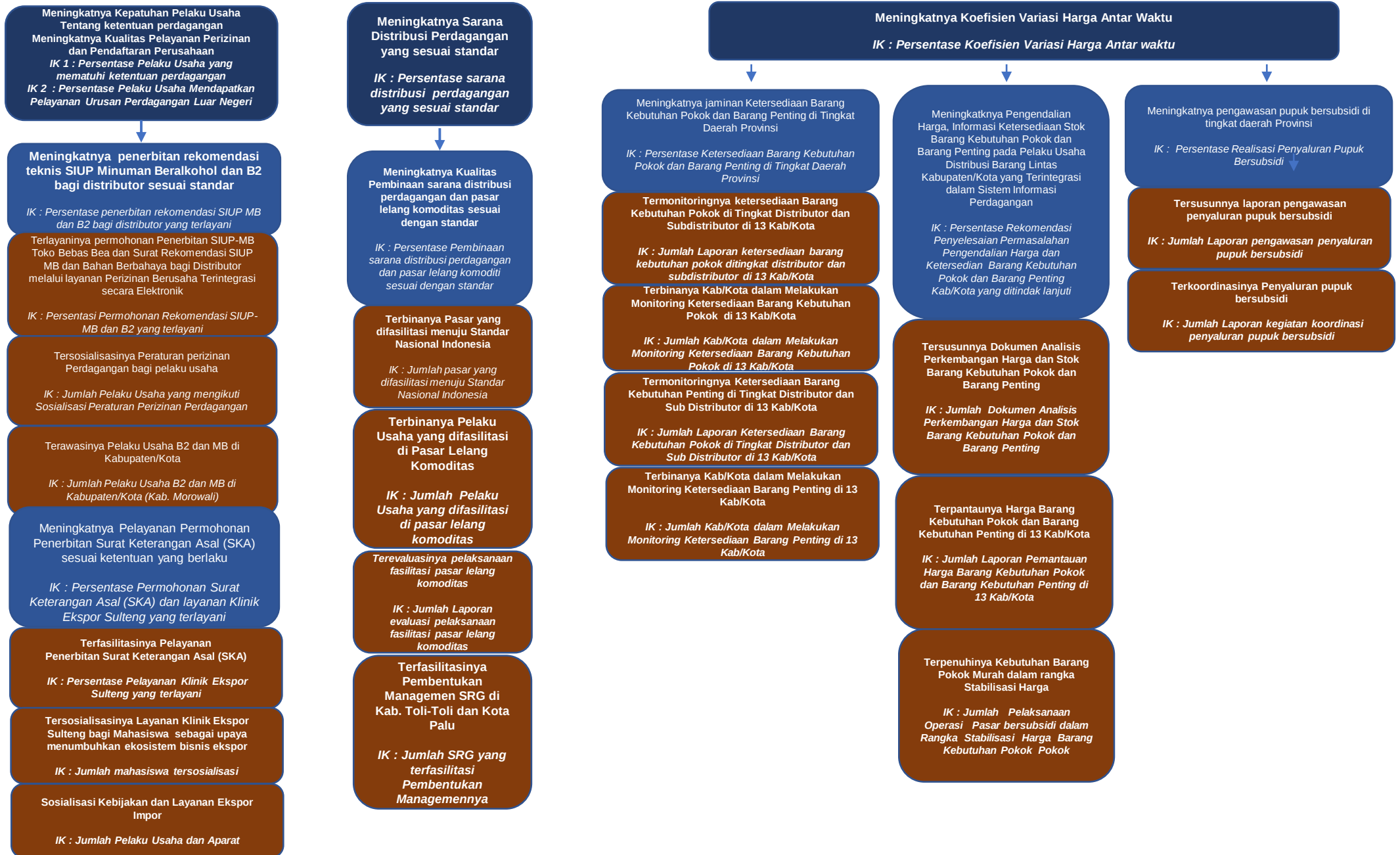
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

POHON KINERJA DISPERINDAG SULTENG TAHUN 2025

POHON KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



Kinerja Operasional Perdagangan

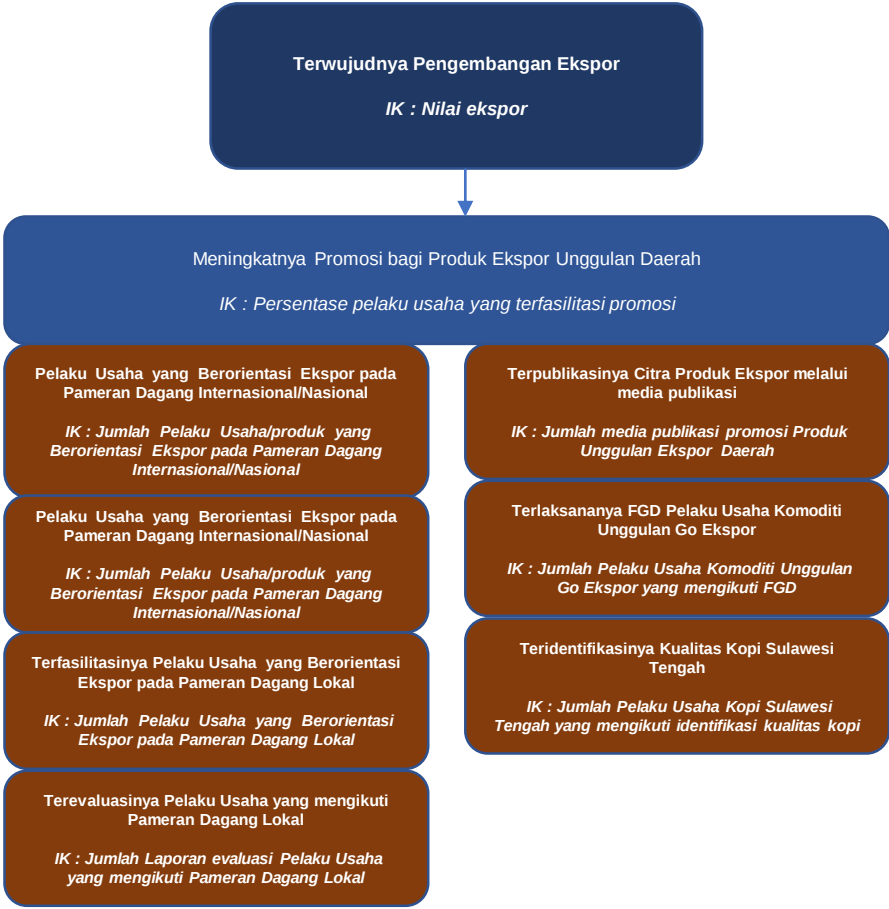


Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen

IK 1 : Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan yang Terakreditasi
IK 2 : Persentase pelayanan penyelesaian pengaduan konsumen yang difasilitasi



Kinerja Operasional Perdagangan



Kinerja Operasional Perindustrian

Meningkatnya Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Industri
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas
Meningkatnya Fasilitas Jasa Layanan IKM

IK 1 : Persentase Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) (%)
IK 2 : Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Industri (%)
IK 3 : Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri (%)
IK 4 : Persentase Jasa Layanan IKM yang terfasilitasi (%)

Meningkatnya Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPIP
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan RPIP
Meningkatnya Ketersediaan Bahan Baku Industri
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Industri
Meningkatnya Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelaku Usaha Industri
Meningkatnya Kualitas Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri
Meningkatnya PAD

IK 1 : Persentase Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPIP (%)
IK 2 : Persentase Evaluasi Pelaksanaan RPIP yang berkualitas (%)
IK 3 : Persentase Ketersediaan Bahan Baku Industri (%)
IK 4 : Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Industri (%)
IK 5 : Persentase capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (%)
IK 6 : Persentase Kuantitas dan Kualitas Pelaku Usaha Industri (%)
IK 7 : Persentase Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri yang berkualitas
IK 8 : IK :Persentase penerimaan dari jasa layanan pelaku usaha IKM

Tersusunnya dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah
IK : Jumlah dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) yang tersusun

Terfasilitasinya penyusunan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota.
IK : Jumlah laporan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota yang terfasilitasi

Tersedianya data fasilitas Bina Pelaku Industri
IK : Jumlah laporan fasilitas Bina Pelaku Industri (Laporan)

Terevaluasinya sasaran rencana pembangunan industri
IK : Jumlah Laporan Evaluasi sasaran rencana pembangunan industri (Laporan)

Tersedianya Data Potensi Bahan Baku Industri
IK : Jumlah Data Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia (Laporan)

Terlatihnya Tenaga Kerja Industri
IK : Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih (orang)

Terfasilitasinya HAKI
IK : Jumlah Sertifikat HAKI yang Terfasilitasi

Tersosialisasinya Kebijakan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.
IK : Jumlah sosialisasi terkait Kebijakan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (sosialisasi)

Terevaluasinya capain realisasi PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
IK : Jumlah laporan capaian realisasi PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi (laporan)

Tersusunnya Laporan Pengawasan Kawasan Industri
IK : Jumlah Laporan Pengawasan Kawasan Industri yang tersusun

Terlaksannya Penerapan Peraturan mengenai Perwilayahan dan Peraturan Peraturan lainnya
IK : Penerapan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayan dan Peraturan lainnya

Terlaksannya koordinasi terkait perkembangan perwilayahan, kawasan industri
IK : Jumlah koordinasi terakit perwilayahan, kawasan industri

Terpenuhinya penerapan standarisasi pelaku industri
IK : Jumlah pelaku industri yang memenuhi standarisasi

Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Industri
IK : Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Industri yang Disediakan

Terbinanya Pelaku usaha industri
IK : Jumlah pelaku usaha industri yang terbina

Terfasilitasinya Pelaku usaha industri
IK : Jumlah pelaku usaha industri yang terfasilitasi

Terbinanya Sentra Industri
IK : Jumlah sentra yang terbina

Terfasilitasinya promosi dan pemasaran produk IKM
IK : Jumlah promosi dan pemasaran produk IKM yang terfasilitasi

Terfasilitasinya layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM, Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat
IK : Jumlah layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM, Mahasiswa, Pelajar dan masyarakat yang terfasilitasi

Terfasilitasinya jasa layanan produksi
IK : Jumlah jasa layanan produksi yang terfasilitasi

Terbinanya IKM dalam peningkatan mutu produk
IK : Jumlah pelaku usaha IKM yang terbina

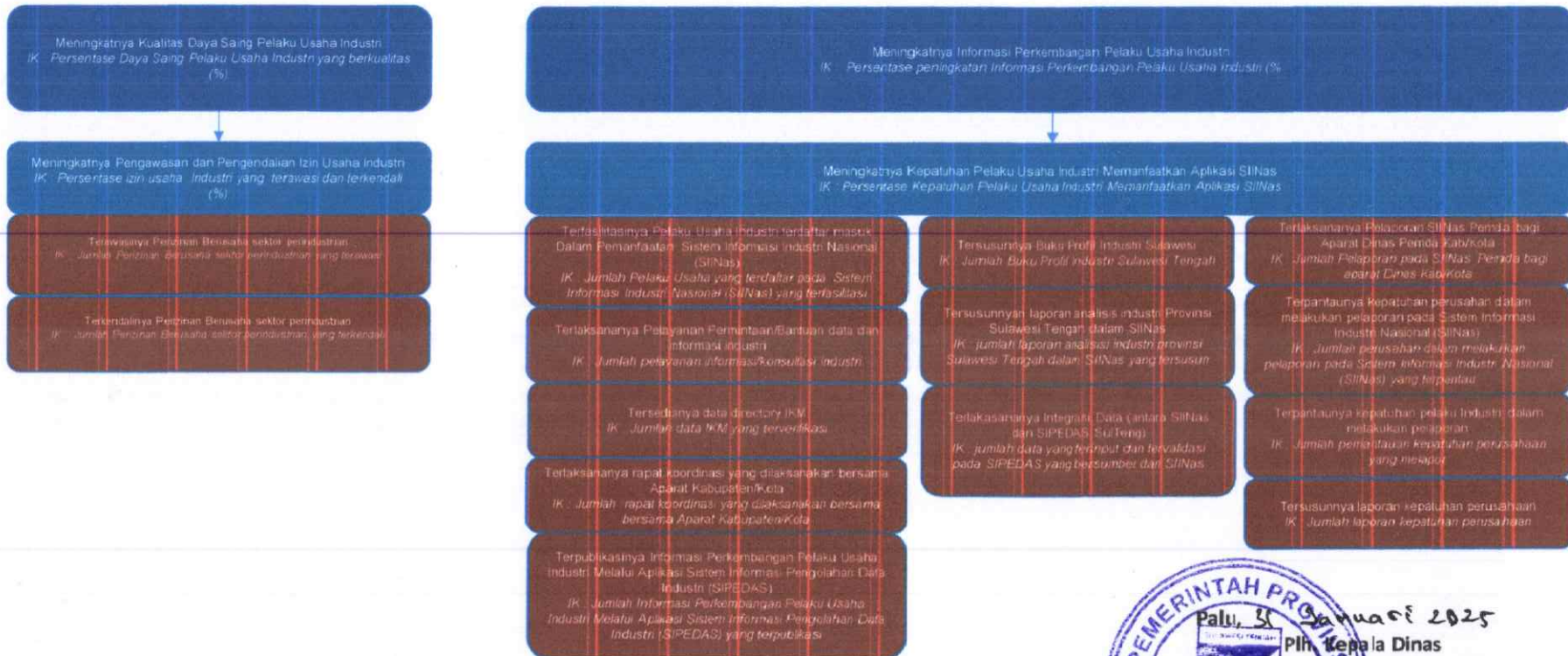
Terfasilitasinya kerjasama pengembangan produk IKM dengan pihak swasta
IK : Jumlah kerjasama pengembangan produk IKM dengan pihak swasta (MoU/Kerjasama) yang terfasilitasi

Terkelolanya website layanan IKM
IK : Jumlah website Admin Rumah Kemas dan layanan IKM yang terkelola

Tersusunnya Laporan Data IKM yang membutuhkan pembinaan
IK : Laporan Data IKM

Tertribusinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber produk IKM
IK : Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber produk IKM yang tertribusi

Kinerja Operasional Perindustrian



Palu, 31 Januari 2025
 Plh. Kepala Dinas
 Perindustrian dan Perdagangan
 Provinsi Sulawesi Tengah,
MIRA JULIASTUTI, ST., MP
 Pembina Tkt. I
 NIP. 19730831 200012 2 002

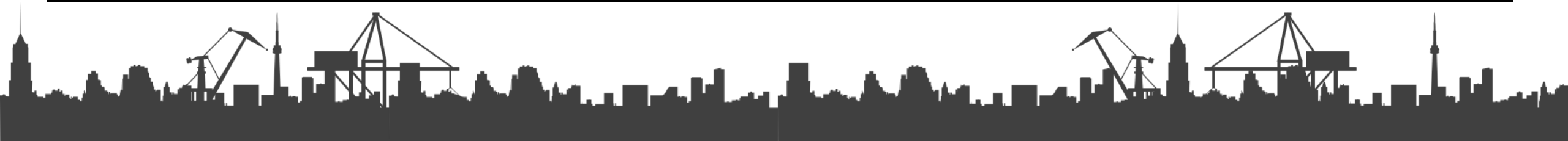


DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

CASCADING DISPERINDAG SULTENG TAHUN 2025

MISI

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
- 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.**
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.



MISI 3:

Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

TUJUAN
1

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH

INDIKATOR
TUJUAN

PERTUMBUHAN EKONOMI

SASARAN
STRATEGIS

MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH

MENINGKATNYA PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

MENINGKATNYA NILAI REALISASI INVESTASI

MENINGKATNYA PENDAPATAN DAN DAYA SAING DAERAH

MENINGKATNYA PERAN KOPERASI DAN UMKM MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH

PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

NILAI REALISASI INVESTASI

PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN

INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)

KONTRIBUSI SEKTOR KOPERASI TERHADAP PDRB

KONTRIBUSI SEKTOR UKM TERHADAP PDRB

URUSAN

PERTANIAN
PARIWISATA

PERIKANAN
PERDAGANGAN

PERINDUSTRIAN

PENANAMAN MODAL

PENDAPATAN

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG; PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN; PERHUBUNGAN; KEUANGAN; ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL; PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Misi 3

Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

Tujuan 3.1 RPJMD

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

Indikator Tujuan 3.1 RPJMD

Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran Strategis RPJMD

Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah

Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan

Indikator Sasaran Strategis RPJMD

Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Daerah

Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Daerah

Tujuan DISPERINDAG

Mewujudkan Pemerataan Harga Barang Pokok antar wilayah

Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan

Meningkatkan Nilai Ekspor Bersih

Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas



PK
KADIS

Indikator Tujuan DISPERINDAG

Koefisien Variasi Harga antar Wilayah

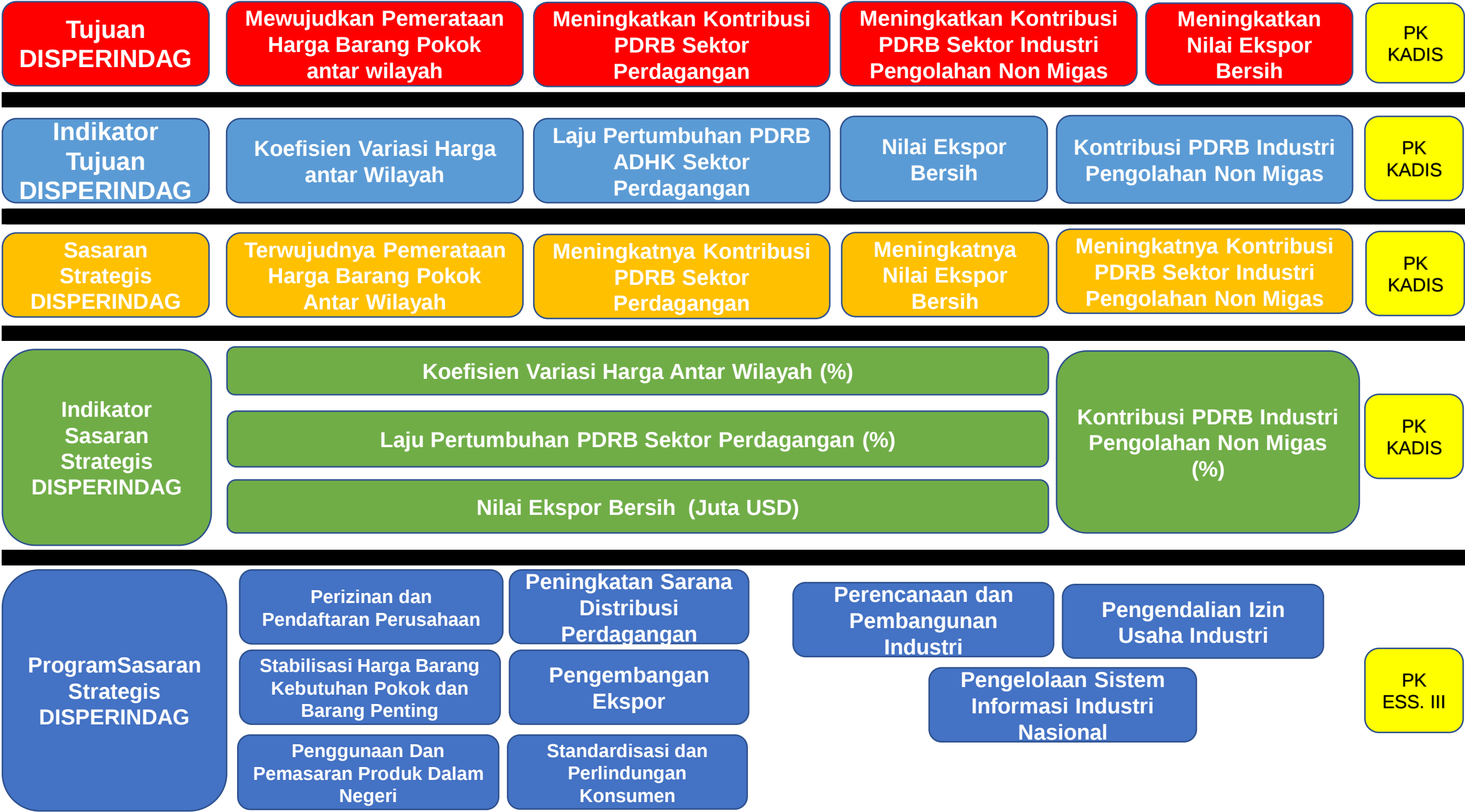
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan

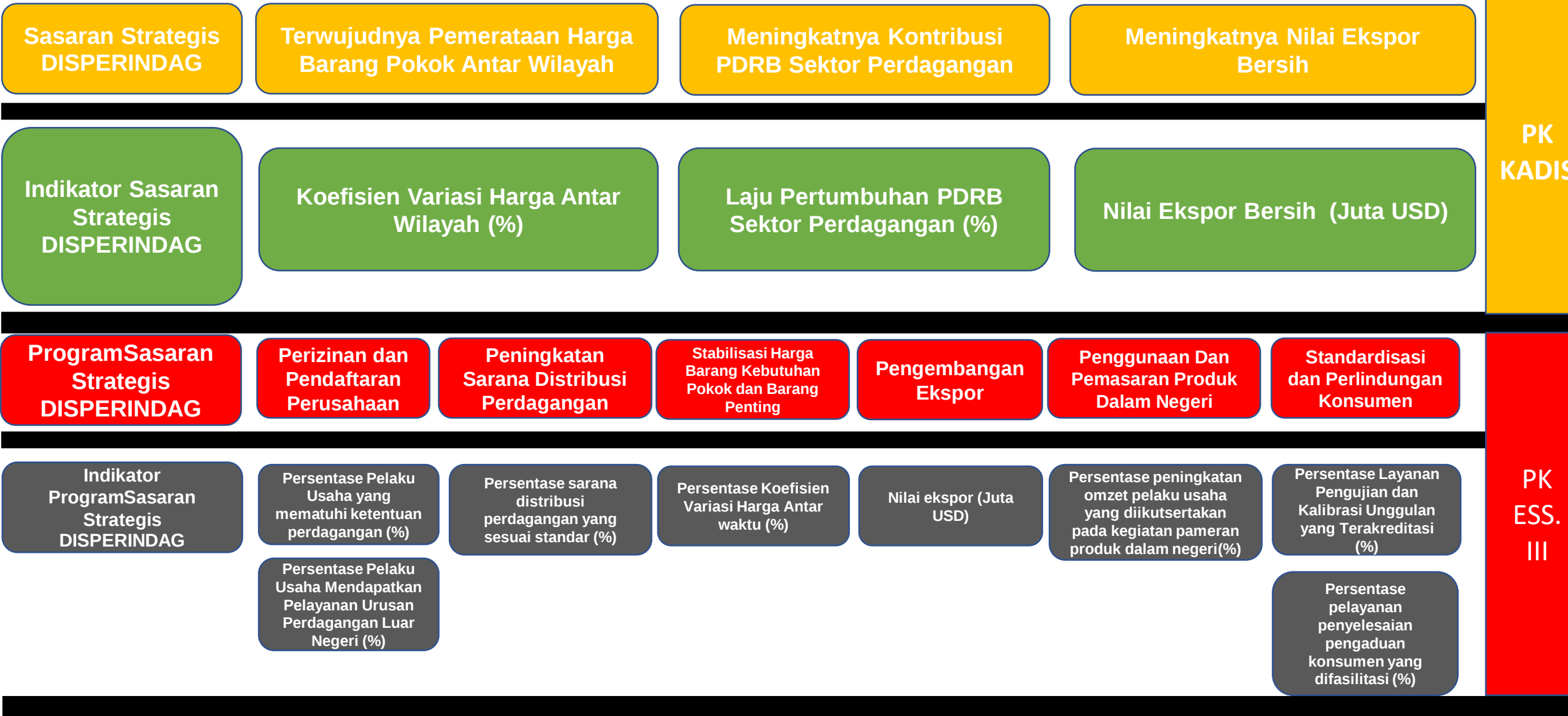
Nilai Ekspor Bersih

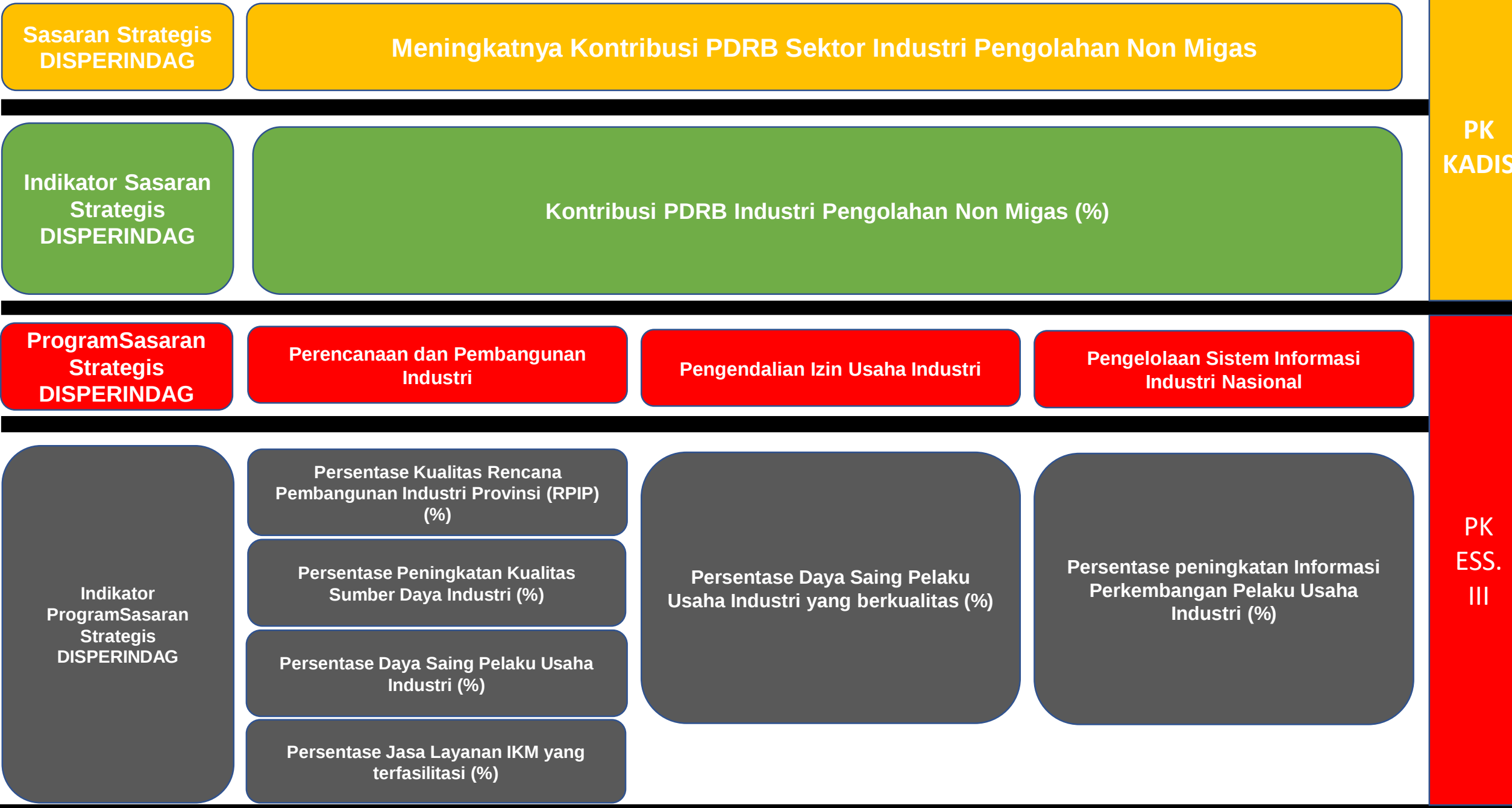
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas



PK
KADIS



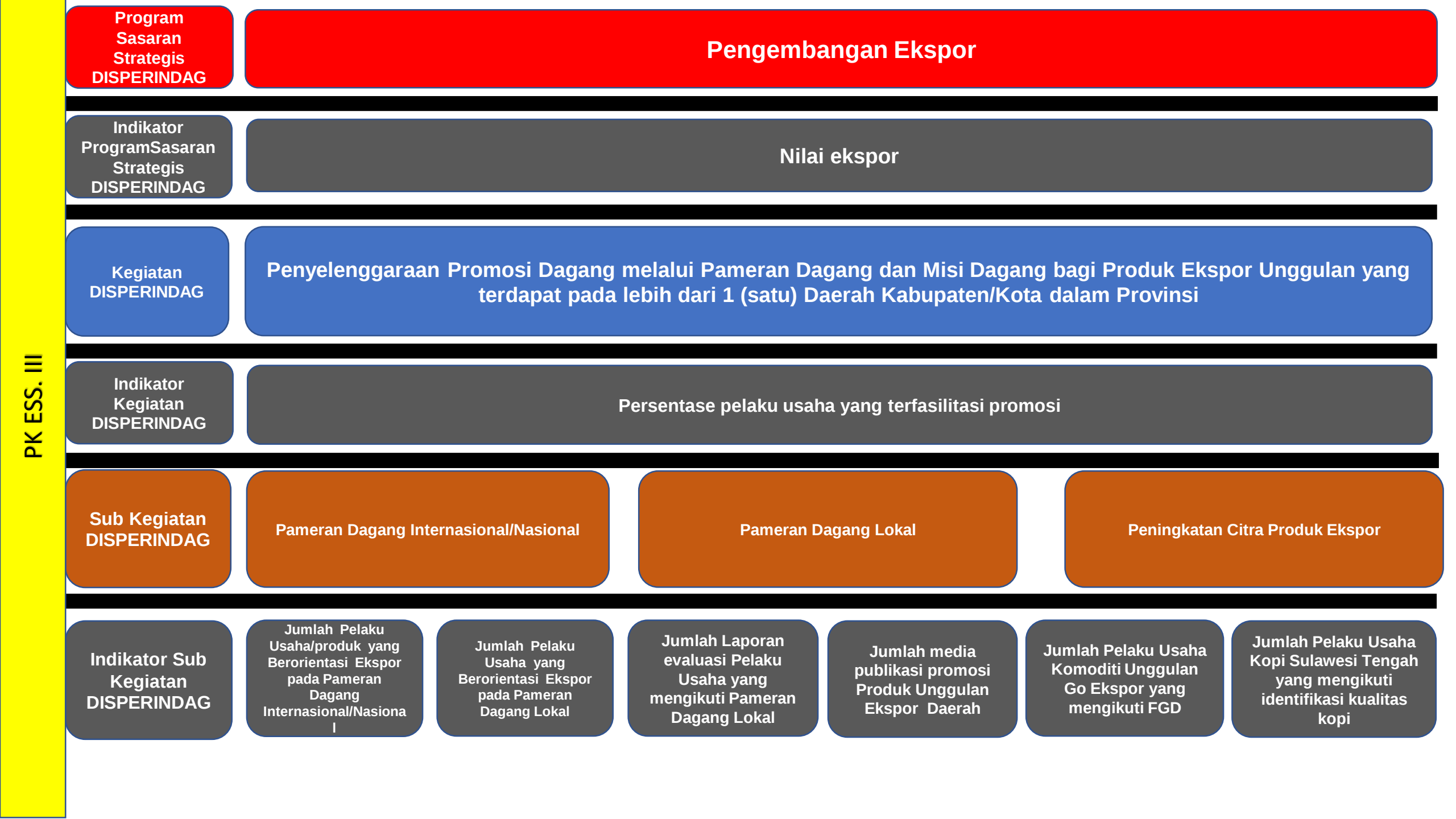




PK ESS. III	ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					
	Indikator ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan (%)			Persentase Pelaku Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri (%)		
	Kegiatan DISPERINDAG	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		
	Indikator Kegiatan DISPERINDAG	Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani			Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani		
	Sub Kegiatan DISPERINDAG	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		
	Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG	Persentasi Permohonan Rekomendasi SIUP-MB dan B2 yang terlayani	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perizinan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha B2 dan MB di Kabupaten/Kota (Kab. Morowali)	Persentase Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	Jumlah mahasiswa tersosialisasi	Jumlah Pelaku Usaha dan Aparat

PK ESS. III	ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			
	Indikator ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar (%)			
	Kegiatan DISPERINDAG	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			
	Indikator Kegiatan DISPERINDAG	Persentase Pembinaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditi sesuai dengan standar (%)			
	Sub Kegiatan DISPERINDAG	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	
	Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi di pasar lelang komoditas	Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pasar lelang komoditas	Jumlah SRG yang terfasilitasi Pembentukan Managemennya

Program Sasaran Strategis DISPERINDAG	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting									
Indikator Program Sasaran Strategis DISPERINDAG	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar waktu (%)									
Kegiatan DISPERINDAG	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				
Indikator Kegiatan DISPERINDAG	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjuti			Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi				
Sub Kegiatan DISPERINDAG	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		
Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah Laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat distributor dan subdistributor di 13 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Pokok	Jumlah Laporan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi	





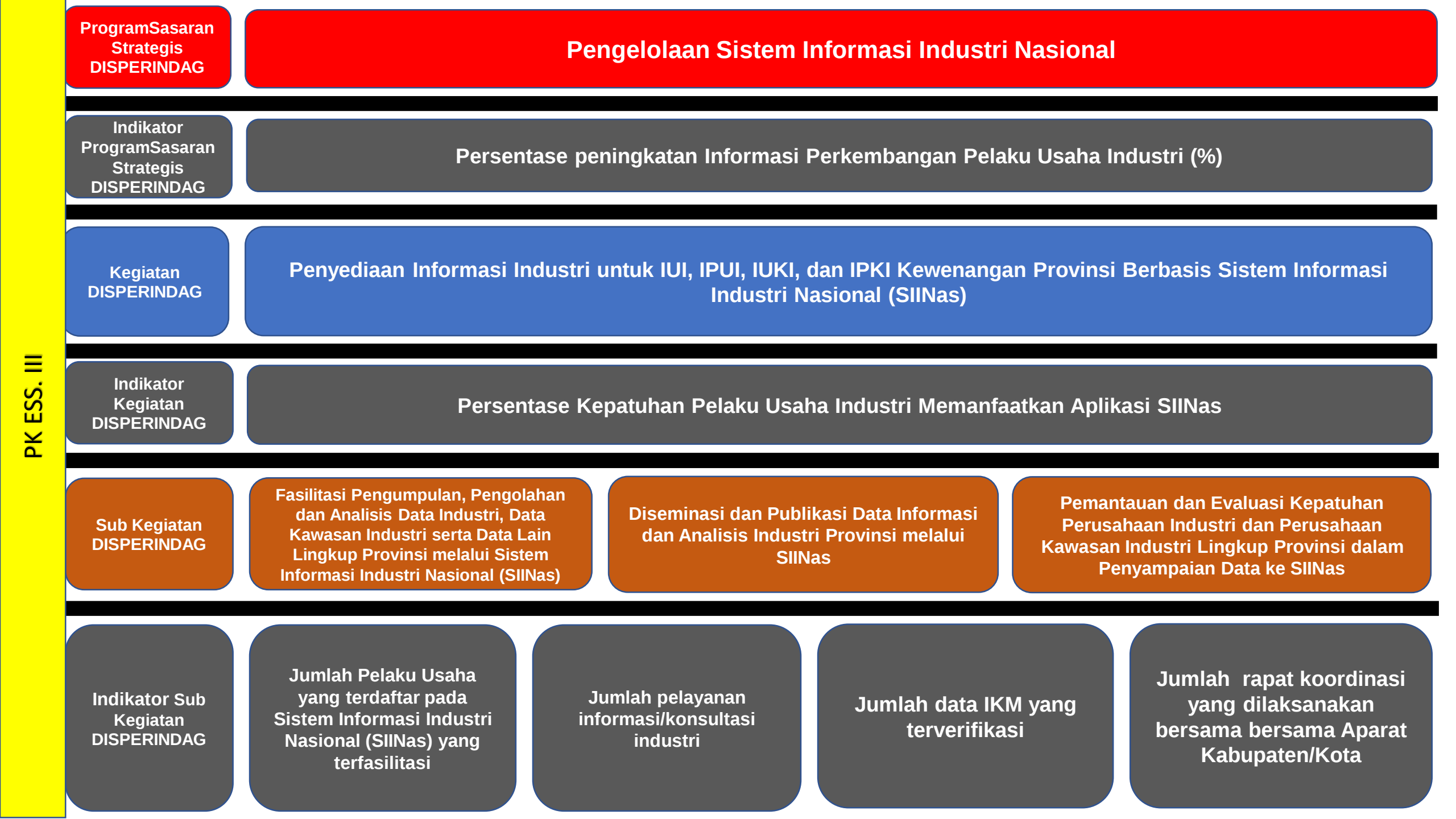
PK ESS. IV	Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah Produk Unggulan yang terpantau	Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang tersedia	Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing	Persentase permohonan Pengujian Mutu Barang yang terlayani	Jumlah kegiatan Bimtek Pengujian untuk Penambahan Ruang Lingkup Nutrisi Pangan	Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing	Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang tersedia	Nilai hasil uji profisiensi	Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan pengujian	Persentase Produk usaha yang tersertifikasi penggunaa n tanda SNI
		Jumlah tenaga teknis yang terbimbing	Hasil penilaian surveillance	Jumlah dokumen penambahan Ruang Lingkup sertifikasi produk kopi bubuk	Persentase permohonan kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang terlayani	Hasil penilaian surveillance	Nilai hasil uji profisiensi	Jumlah alat yang di rekalibrasi	Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi	Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing	

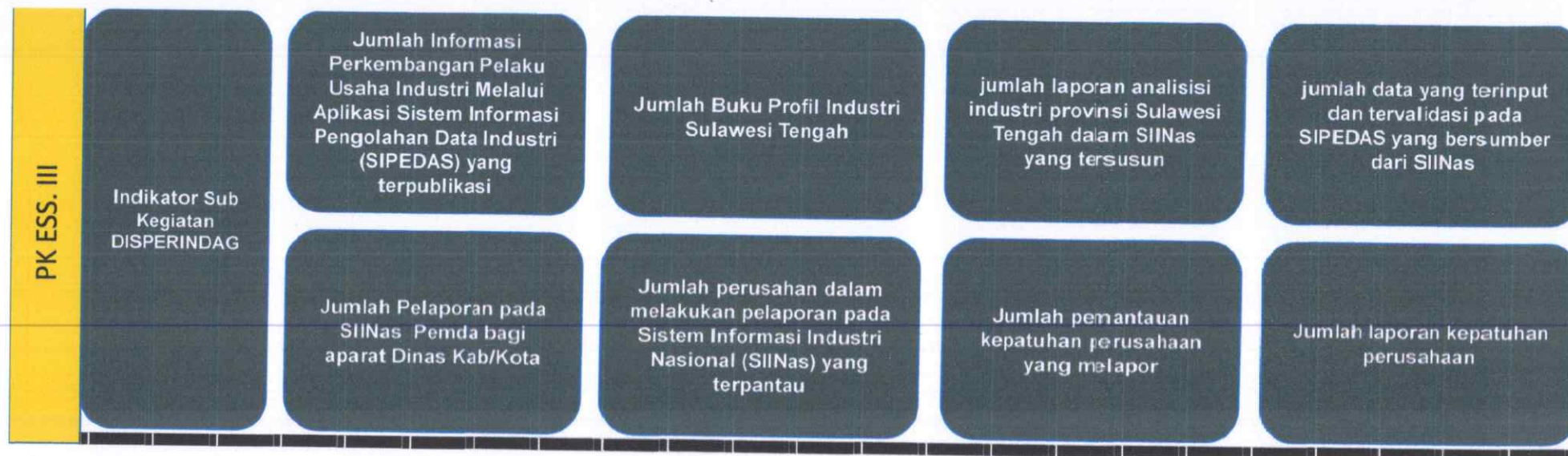


PK ESS. III	ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Indikator ProgramSasara n Strategis DISPERINDAG	Persentase Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) (%)
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Industri (%)
		Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri (%)
		Persentase Jasa Layanan IKM yang terfasilitasi (%)
	Kegiatan DISPERINDAG	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	Indikator Kegiatan DISPERINDAG	Persentase Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPIP (%)
		Persentase Evaluasi Pelaksanaan RPIP yang berkualitas (%)
		Persentase Ketersediaan Bahan Baku Industri (%)
		Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Industri (%)
		Persentase capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (%)
		Persentase Kuantitas dan Kualitas Pelaku Usaha Industri (%)
		Persentase Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri yang berkualitas (%)
		Persentase penerimaan dari jasa layanan pelaku usaha IKM (%)

Sub Kegiatan DISPERINDAG							
Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG							
Jumlah dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) yang tersusun	Jumlah laporan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota yang terfasilitasi	Jumlah Laporan fasilitasi Bina Pelaku Industri (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi sasaran rencana pembangunan industri (Laporan)	Jumlah Data Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia (Laporan)	Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih (orang)	Jumlah Sertifikat HAKI yang Tetfasilitasi	
Jumlah sosialisasi terkait Kebijakan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (sosialisasi)	Jumlah laporan capaian realisasi PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi (laporan)	Jumlah Laporan Pengawasan Kawasan Industri yang tersusun	Penerapan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayan dan Peraturan lainnya	Jumlah koordinasi terakit perwilayahan, kawasan industri	Jumlah pelaku industri yang memenuhi standarisasi	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Industri yang Disediakan	
Jumlah pelaku usaha industri yang terbina	Jumlah pelaku usaha industri yang terfasilitasi	Jumlah sentra yang terbina	Jumlah promosi dan pemasaran produk IKM yang terfasilitasi	Jumlah layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM, Mahasiswa, Pelajar dan masyarakat yang terfasilitasi	Jumlah jasa layanan produksi yang terfasilitasi	Jumlah pelaku usaha IKM yang terbina	
Jumlah kerjasama pengembangan produk IKM dengan pihak swasta (MoU/Kerjasama) yang terfasilitasi		Jumlah website Admin Rumah Kemasan dan layanan IKM yang dikelola		Laporan Data IKM	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber produk IKM yang teretribusi		

PK ESS. III	ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Pengendalian Izin Usaha Industri	
	Indikator ProgramSasaran Strategis DISPERINDAG	Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri yang berkualitas (%)	
	Kegiatan DISPERINDAG	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
	Indikator Kegiatan DISPERINDAG	Persentase izin usaha Industri yang terawasi dan terkendali (%)	
	Sub Kegiatan DISPERINDAG	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi
	Indikator Sub Kegiatan DISPERINDAG	Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terawasi	Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terkendali





Palu, 31 Januari 2025

Pt. Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah,



MIRA YULIASUTI, ST., MP
Pembina Tkt.I
NIP. 19730831 200012 2 002

CASCADING DISPERINDAG SULTENG TAHUN 2025